



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN KINERJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kinerja perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kinerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);

13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kinerja (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KINERJA.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kinerja (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Metode penghitungan kehadiran Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan sesuai dengan indikator kehadiran sebagai berikut:
 - a. izin tidak hadir dipotong 1% (satu perseratus) perhari dari besaran TPK Statis;
 - b. terlambat masuk kerja dipotong 0,5% (nol koma lima perseratus) perhari dari besaran TPK Statis;
 - c. pulang cepat dipotong 0,5% (nol koma lima perseratus) perhari dari besaran TPK Statis; dan
 - d. tanpa kabar dipotong 3% (tiga perseratus) perhari dari besaran TPK Statis.
- (2) Ketentuan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang sedang dalam keadaan:
 - a. sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
 - b. melakukan Perjalanan Dinas, dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas; dan
 - c. mengambil cuti, kecuali cuti di luar tanggungan Negara;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD/Unit Kerja, fungsional teknis, petugas pemadam kebakaran, pelaksana administrasi pada ruangan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, petugas kebersihan, ajudan dan sopir Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah.

- (4) PNS yang melaksanakan Dinas Luar atau karena adanya urusan mendesak yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dilakukan pemotongan TPK Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Terlambat dan/atau pulang cepat karena urusan mendesak yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang yang tidak dilakukan pemotongan TPK Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maksimal 3 kali dalam satu bulan dan akumulasi 18 kali dalam satu tahun.
 - (6) Izin tidak hadir karena urusan mendesak yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual yang tidak dilakukan pemotongan TPK Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maksimal 2 hari dalam sebulan dan akumulasi 12 hari dalam setahun.
 - (7) Terlambat dan/atau pulang cepat serta Izin tidak hadir karena urusan mendesak di luar jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dikenakan pemotongan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (8) Dinas Luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dinyatakan dengan surat keterangan melaksanakan tugas kedinasan dari atasan langsungnya, atau adanya undangan kedinasan serta untuk urusan mendesak harus diketahui atasan langsungnya di ikuti pembuatan surat keterangan.
 - (9) Formulir daftar perhitungan kehadiran PNS tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf f diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Indikator penilaian kegiatan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memiliki target poin yang berbeda.
- (2) Indikator yang bersifat penyelesaian tata naskah dinas, tugas administrasi dan tugas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot 50% (lima puluh perseratus), meliputi:
 - a. SKPD Tipe A :
 1. Eselon IIa (Jabatan Tinggi Pratama) target 100 (seratus) poin dalam 1 (satu) bulan;
 2. Eselon IIb (Jabatan Tinggi Pratama) target 80 (delapan puluh) poin dalam 1 (satu) bulan;
 3. Eselon IIIa (Jabatan Administrator) target 60 (enam puluh) poin dalam 1 (satu) bulan;
 4. Eselon IIIb (Jabatan Administrator) target 45 (empat puluh lima) poin dalam 1 (satu) bulan;

5. Eselon IVa (Jabatan Pengawas) target 30 (tiga puluh) poin dalam 1 (satu) bulan;
 6. Eselon IVb (Jabatan Pengawas) target 20 (dua puluh) poin dalam 1 (satu) bulan;
- b. SKPD Tipe B :
1. Eselon IIb (Jabatan Tinggi Pratama) target 75 (tujuh puluh lima) poin dalam 1 (satu) bulan;
 2. Eselon IIIa (Jabatan Administrator) target 55 (lima puluh lima) poin dalam 1 (satu) bulan;
 3. Eselon IIIb (Jabatan Administrator) target 40 (empat puluh) poin dalam 1 (satu) bulan;
 4. Eselon IVa (Jabatan Pengawas) target 25 (dua puluh lima) poin dalam 1 (satu) bulan;
 5. Eselon IVb (Jabatan Pengawas) target 20 (dua puluh) poin dalam 1 (satu) bulan;
- c. SKPD Tipe C :
1. Eselon IIb (Jabatan Tinggi Pratama) target 70 (tujuh puluh) poin dalam 1 (satu) bulan;
 2. Eselon IIIa (Jabatan Administrator) target 50 (lima puluh) poin dalam 1 (satu) bulan;
 3. Eselon IIIb (Jabatan Administrator) target 35 (tiga puluh lima) poin dalam 1 (satu) bulan;
 4. Eselon IVa (Jabatan Pengawas) target 20 (dua puluh) poin dalam 1 (satu) bulan;
 5. Eselon IVb (Jabatan Pengawas) target 18 (delapan belas) poin dalam 1 (satu) bulan;
- d. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan RSUD:
1. Eselon IIIa (Jabatan Administrator) target 60 (enam puluh) poin dalam 1 (satu) bulan;
 2. Eselon IIIb (Jabatan Administrator) target 35 (tiga puluh lima) poin dalam 1 (satu) bulan;
 3. Eselon IVa (Jabatan Pengawas) target 20 (dua puluh) poin dalam 1 (satu) bulan;
- e. Kecamatan dan Kelurahan:
1. Eselon IIIa (Jabatan Administrator) target 60 (enam puluh) poin dalam 1 (satu) bulan;
 2. Eselon IIIb (Jabatan Administrator) target 35 (tiga puluh lima) poin dalam 1 (satu) bulan;
 3. Eselon IVa (Jabatan Pengawas) target 20 (dua puluh) poin dalam 1 (satu) bulan;
 4. Eselon IVb (Jabatan Pengawas) target 18 (delapan belas) poin dalam 1 (satu) bulan;
- f. Staf Ahli Bupati, target 80 (delapan puluh) poin dalam 1 (satu) bulan;
- g. Eselon V target 17 (tujuh belas) poin dalam 1 (satu) bulan;
- h. Jabatan Fungsional Umum/Tertentu target 15 (lima belas) poin dalam 1 (satu) bulan.

- (3) Target Poin untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana menyesuaikan dengan target Poin SKPD Tipe B sampai dengan ditetapkan Tipe Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana yang baru sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (4) Indikator untuk penyelesaian tugas khusus bagi PNS yang diperintahkan oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) memiliki bobot 50% (lima puluh perseratus) dengan target poin sesuai jabatannya masing-masing.
3. Ketentuan dalam Lampiran I angka 2, angka 3 dan angka 4 diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 4. Ketentuan dalam Lampiran II angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 10 dan angka 11 diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kinerja ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ROOSWANDI SALEM

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019
NOMOR 01**

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERATURAN BUPATI TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2018
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BERDASARKAN KINERJA

NILAI DAN KELAS JABATAN PNS			
NO	SKPD/JABATAN	NILAI JABATAN	KELAS JABATAN
1	Sekretaris Daerah	3600	15
2	SKPD Beban Kerja Sangat Tinggi dan melaksanakan fungsi koordinator (Setda, Inspektorat Daerah, Bappeda, BPKAD)		
	Eselon II b	3150	14
	Staf Ahli Bupati	3110	14
	Eselon III a	2290	12
	Eselon III b	1800	10
	Eselon IV a	1475	9
	Eselon IV b	1295	8
3	SKPD Beban Kerja Sangat Tinggi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)		
	Eselon II b	3015	14
	Eselon III a	2240	12
	Eselon III b	1780	10
	Eselon IV a	1430	9
	Eselon IV b	1295	8
	Eselon V a atau Tata Usaha	1165	8
4	SKPD Beban Kerja Tinggi (Sekretariat DPRD, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Dinas Sosial, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perikanan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran)		
	Eselon II b	2755	14
	Eselon III a	2180	12
	Eselon III b	1715	10
	Eselon IV a	1385	9
	Eselon IV b	1295	8
5	SKPD Beban Kerja Sedang (Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perpustakaan & Kearsipan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, RSUD)		
	Eselon II b	2465	13
	Eselon III a (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik) atau Direktur RSUD	2290	12
	Eselon III a (Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	2155	12
	Eselon III b atau Kepala Bidang pada RSUD	1675	10
	Eselon IV a atau Kepala Seksi/Sub bagian pada RSUD	1340	8
6	KECAMATAN		
	Eselon III a (Camat)	2290	12
	Eselon III b	1675	10
	Eselon IV a	1340	8
	Eselon IV b	1295	8
7	KELURAHAN		
	Eselon IV a (Lurah)	1475	9
	Eselon IV b	1295	8
8	UPT (Puskesmas)		
	Eselon IV a/Kepala Puskesmas	1430	9
	Eselon IV b/Kepala Tata Usaha	1295	8
9	JFU		
	Golongan IV yang pernah menjabat Eselon II	1085	7
	Golongan IV keatas atau yang pernah menjabat Eselon III	1055	7

	Golongan III / Analis, Penelaah, Penyusun, Perancang & sejenisnya	1005	7
	Golongan II / Bendahara, Pengolah Data, Pengadministrasi & sejenisnya	805	6
	Golongan I / Petugas Keamanan, Pengemudi, Pramuka Bakti, Pramuka Kebersihan & sejenisnya	755	6
	Golongan I / Petugas Keamanan, Pengemudi	370	3
	Golongan I / Pramuka Bakti, Pramuka Kebersihan & sejenisnya	205	1
10	JFT Perencana		
	Perencana Utama	2365	13
	Perencana Madya	1860	11
	Perencana Muda	1420	9
	Perencana Pertama	1255	8
11	JFT Auditor dan P2UPD		
	Auditor Utama	2365	13
	Auditor Madya	1860	11
	Auditor Muda	1430	9
	Auditor Pertama	1255	8
	Auditor Pelaksana	805	6
	Auditor Pelaksana Lanjutan	905	7
	Auditor Penyelia	1105	7
	P2UPD Utama	2365	13
	P2UPD Madya	1860	11
	P2UPD Muda	1430	9
	P2UPD Pertama	1255	8
	Auditor Kepegawaian Pertama	1255	8
	Auditor Kepegawaian Muda	1430	9
	Auditor Kepegawaian Madya	1860	11
	Auditor Kepegawaian Utama	2365	13
12	JFT Pengadaan barang dan jasa		
	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	1300	8
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Muda	1400	9
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Madya	2095	11
13	JFT Tenaga Pendidikan		
	Guru	1205	8
	Penilik	1355	9
	Pengawas	1355	9
	Kepala Sekolah TK	1220	8
	Kepala Sekolah SD	1315	8
	Kepala Sekolah SMP	1415	9
14	Tenaga Kesehatan pada RSUD		
	Dokter Spesialis	3200	15
	Dokter Spesialis Residen	3200	15
	Wajib Kerja Dokter Spesialis	3000	14
	Teknik Elektromedis Pelaksana	805	6
	Dokter Umum	1535	9
	Dokter Gigi	1535	9
	Apoteker	1265	8
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	1140	8
	Psikolog	1140	8
	Radiografer	1085	7
	Pranata Laboratorium Kesehatan	835	6
	Asisten Apoteker	765	6
	Teknisi Transfusi Darah	605	5
	Epidemiolog Kesehatan	1140	8
	Pembimbing Kesehatan Kerja	1140	8
	Administrator Kesehatan	1140	8
	Sanitarian	640	5
	Nutrisionis	840	6
	Bidan	850	6
	Perawat	850	6
	Refraksionis Optisien	840	6
	Fisioterapis	840	6
	Perekam Medis	640	5
	Perawat Gigi	850	6
	<u>NERS</u>		
	Perawat NERS	1135	8
	<u>ANESTHESI</u>		
	Perawat Anestesi	850	6
	Juru Masak	340	3
15	Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan (Daerah Biasa)		
	Dokter	1535	9
	Dokter Gigi	1535	9

	Bidan (Tk. Ahli)	1105	8
	Bidan (Tk. Terampil)	1035	7
	Apoteker (Tk. Ahli)	1105	8
	Perawat (Tk. Ahli)	1105	8
	Perawat (Tk. Terampil)	1035	7
	Asisten Apoteker (Tk. Terampil)	1035	7
	Perawat Gigi (Tk. Terampil)	1035	7
	Nutrisionis (Tk. Ahli)	1105	8
	Nutrisionis (Tk. Terampil)	1035	7
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat (Tk. Ahli)	1105	8
	Sanitarian (Tk. Ahli)	1105	8
	Sanitarian (Tk. Terampil)	1035	7
	Pranata Laboratorium Kesehatan (Tk. Ahli)	1105	8
	Pranata Laboratorium Kesehatan (Tk. Terampil)	1035	7
	Perekam Medis (Tk. Terampil)	1035	7
16	Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan (Daerah Terpencil)		
	Dokter	1535	9
	Dokter Gigi	1535	9
	Bidan (Tk. Ahli)	1105	8
	Bidan (Tk. Terampil)	1035	7
	Apoteker (Tk. Ahli)	1105	8
	Perawat (Tk. Ahli)	1105	8
	Perawat (Tk. Terampil)	1035	7
	Asisten Apoteker (Tk. Terampil)	1035	7
	Perawat Gigi (Tk. Terampil)	1035	7
	Nutrisionis (Tk. Ahli)	1105	8
	Nutrisionis (Tk. Terampil)	1035	7
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat (Tk. Ahli)	1105	8
	Sanitarian (Tk. Ahli)	1105	8
	Sanitarian (Tk. Terampil)	1035	7
	Pranata Laboratorium Kesehatan (Tk. Ahli)	1105	8
	Pranata Laboratorium Kesehatan (Tk. Terampil)	1035	7
	Perekam Medis (Tk. Terampil)	1035	7
17	JFT (Kelangkaan profesi dokter hewan dan Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Penyuluh Peternakan dan sejenisnya)		
	Medik Veteriner Ahli Pertama	1350	8
	Medik Veteriner Ahli Muda	1440	9
	Medik Veteriner Ahli Madya	1860	11
	Medik Veteriner Ahli Utama	2365	13
	Paramedik Veteriner pelaksana atau Golongan II	805	6
	Paramedik Veteriner pertama atau Golongan III	1180	8
	Paramedik Veteriner (Golongan IV)	1800	10
	Pengawas Mutu Pakan pelaksana atau Golongan II	805	6
	Pengawas Mutu Pakan pertama atau Golongan III	1180	8
	Pengawas Mutu Pakan (Golongan IV)	1800	10
	Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman pelaksana atau Golongan II	805	6
	Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman pertama atau Golongan III	1180	8
	Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (Golongan IV)	1800	10
	Pengawas Benih Tanaman pelaksana atau Golongan II	805	6
	Pengawas Benih Tanaman pertama atau Golongan III	1180	8
	Pengawas Benih Tanaman (Golongan IV)	1800	10
	Pengawas Bibit Ternak pelaksana atau Golongan II	805	6
	Pengawas Bibit Ternak pertama atau Golongan III	1180	8
	Pengawas Bibit Ternak (Golongan IV)	1800	10
	Pengawas Mutu Hasil Pertanian pelaksana atau Golongan II	805	6
	Pengawas Mutu Hasil Pertanian (Golongan III)	1180	8
	Pengawas Mutu Hasil Pertanian (Golongan IV)	1800	10
18	JFT (Pengendali Lingkungan Hidup dan sejenisnya)		
	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Pelaksana atau Golongan II	805	6
	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Pertama	1350	8
	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda	1400	9
	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Madya	1870	11
	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	1350	8
	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	1400	9
	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya	1870	11
	Perencana Lingkungan Hidup	1350	9
19	JFT (Analisis Kepegawaian)		
	Analisis Kepegawaian Pertama	1180	8
	Analisis Kepegawaian Muda	1355	9
	Analisis Kepegawaian Madya	1860	11
	Analisis Kepegawaian Utama	2365	13

20	JFT (Pranata Komputer)		
	Pranata Komputer Pelaksana atau Golongan II	805	6
	Pranata Komputer Pertama atau Golongan III	1180	8
	Pranata Komputer Ahli Muda	1355	9
	Pranata Komputer Ahli Madya	1860	11
	Pranata Komputer Ahli Utama	2365	13
21	JFT lainnya (Tingkat Ahli)		
	Fungsional Ahli Pertama	1180	8
	Fungsional Ahli Muda	1355	9
	Fungsional Ahli Madya	1860	11
	Fungsional Ahli Utama	2365	13
22	JFT lainnya (Tingkat Terampil)		
	Fungsional Terampil Pelaksana atau Golongan II	805	6
23	JFT (Analisis Kebijakan)		
	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	1180	8
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1355	9
	Analisis Kebijakan Ahli Madya	1860	11
	Analisis Kebijakan Ahli Utama	2365	13
24	JFT (Analisis Ketahanan Pangan)		
	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	1180	8
	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	1355	9
	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya	1860	11
25	JFT (Arsiparis)		
	Arsiparis Terampil atau Golongan II	805	6
	Arsiparis Ahli Pertama atau Golongan III	1180	8
	Arsiparis Ahli Muda	1355	9
	Arsiparis Ahli Madya	1860	11
	Arsiparis Ahli Utama	2365	13
26	JFT (Instruktur)		
	Instruktur Pelaksana atau Golongan II	805	6
	Instruktur Ahli Pertama atau Golongan III	1180	8
	Instruktur Ahli Muda	1355	9
	Instruktur Ahli Madya	1860	11
27	JFT (Mediator Hubungan Industri)		
	Mediator Hubungan Industri Ahli Pertama	1180	8
	Mediator Hubungan Industri Ahli Muda	1355	9
	Mediator Hubungan Industri Ahli Madya	1860	11
28	JFT (Pekerja Sosial)		
	Pekerja Sosial Pelaksana atau Golongan II	805	6
	Pekerja Sosial Ahli Pertama atau Golongan III	1180	8
	Pekerja Sosial Ahli Muda	1355	9
	Pekerja Sosial Ahli Madya	1860	11
29	JFT (Pengawas Perikanan/Pengawas Benih Ikan)		
	Pengawas Perikanan/Pengawas Benih Ikan Pelaksana atau Golongan II	805	6
	Pengawas Perikanan/Pengawas Benih Ikan atau Golongan III	1180	8
	Pengawas Perikanan/Pengawas Benih Ikan Ahli Muda	1355	9
	Pengawas Perikanan/Pengawas Benih Ikan Ahli Madya	1860	11
30	JFT (Penggerak Swadaya Masyarakat)		
	Penggerak Swadaya Masyarakat Pelaksana atau Golongan II	805	6
	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama atau Golongan III	1180	8
	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	1355	9
	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya	1860	11
31	JFT (Penguji Kendaraan Bermotor)		
	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana atau Golongan II	805	6
	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan atau Golongan III	1005	7
	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	1105	8
32	JFT (Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan)		
	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana atau Golongan II	805	6
	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama atau Golongan III	1180	8
	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	1355	9
	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Madya	1860	11
33	JFT (Penyuluh Pertanian)		
	Penyuluh Pertanian Pelaksana atau Golongan II	805	6
	Penyuluh Pertanian Pertama atau Golongan III	1180	8
	Penyuluh Pertanian (Golongan IV)	1800	11
34	JFT (Penyuluh Sosial)		
	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	1180	8
	Penyuluh Sosial Ahli Muda	1355	9
	Penyuluh Sosial Ahli Madya	1860	11
35	JFT (Perancang Peraturan dan Perundang-undangan)		
	Perancang Peraturan dan Perundang-undangan Ahli Pertama	1180	8

	Perancang Peraturan dan Perundang-undangan Ahli Muda	1355	9
	Perancang Peraturan dan Perundang-undangan Ahli Madya	1860	11
	Perancang Peraturan dan Perundang-undangan Ahli Utama	2365	13
36	JFT (Pranata Hubungan Masyarakat)		
	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana atau Golongan II	805	6
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama atau Golongan III	1180	8
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	1355	9
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	1860	11
37	JFT (Satuan Polisi Pamong Praja)		
	Satuan Polisi Pamong Praja Pelaksana atau Golongan II	805	6
	Satuan Polisi Pamong Praja Ahli Pertama atau Golongan III	1180	8
	Satuan Polisi Pamong Praja Ahli Muda	1355	9
	Satuan Polisi Pamong Praja Ahli Madya	1860	11
38	JFT (Teknik Jalan dan Jembatan)		
	Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana atau Golongan II	805	6
	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama atau Golongan III	1180	8
	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	1355	9
	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Madya	1860	11
	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Utama	2365	13
39	JFT (Teknik Penyehatan Lingkungan)		
	Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana atau Golongan II	805	6
	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama atau Golongan III	1180	8
	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	1355	9
	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Madya	1860	11
	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Utama	2365	13

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PERATURAN BUPATI TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2018
 TENTANG TAMBAHAN ENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BERDASARKAN KINERJA

BESARAN TPK

NO	SKPD/JABATAN	NILAI JABATAN /NJ	KEMAMPUAN DAERAH/KD (Rp.)	JUMLAH TPK MAKSIMAL (Rp.)
1	Sekretaris Daerah	3600	Rp 8,400	Rp 30,240,000
2	SKPD Beban Kerja Sangat Tinggi dan melaksanakan fungsi koordinator (Setda, Inspektorat Daerah, Bappeda, BPKAD)			
	Eselon II b	3150	Rp 5,500	Rp 17,325,000
	Staf Ahli Bupati	3110	Rp 5,500	Rp 17,105,000
	Eselon III a	2290	Rp 3,500	Rp 8,015,000
	Eselon III b	1800	Rp 3,000	Rp 5,400,000
	Eselon IV a	1475	Rp 3,000	Rp 4,425,000
	Eselon IV b	1295	Rp 2,750	Rp 3,561,250
3	SKPD Beban Kerja Sangat Tinggi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)			
	Eselon II b	3015	Rp 5,500	Rp 16,582,500
	Eselon III a	2240	Rp 3,500	Rp 7,840,000
	Eselon III b	1780	Rp 3,000	Rp 5,340,000
	Eselon IV a	1430	Rp 3,000	Rp 4,290,000
	Eselon IV b	1295	Rp 2,750	Rp 3,561,250
	Eselon V a atau Tata Usaha	1165	Rp 2,750	Rp 3,203,750
4	SKPD Beban Kerja Tinggi (Sekretariat DPRD, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Dinas Sosial, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perikanan, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran)			
	Eselon II b	2755	Rp 5,500	Rp 15,152,500
	Eselon III a	2180	Rp 3,500	Rp 7,630,000
	Eselon III b	1715	Rp 3,000	Rp 5,145,000
	Eselon IV a	1385	Rp 3,000	Rp 4,155,000
	Eselon IV b	1295	Rp 2,750	Rp 3,561,250
5	SKPD Beban Kerja Sedang (Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, RSUD)			
	Eselon II b	2465	Rp 5,500	Rp 13,557,500
	Eselon III a (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik) atau Direktur RSUD	2290	Rp 3,500	Rp 8,015,000
	Eselon III a (Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	2155	Rp 3,500	Rp 7,542,500
	Eselon III b atau Kepala Bidang pada RSUD	1675	Rp 3,000	Rp 5,025,000
	Eselon IV a atau Kepala Seksi/Sub bagian pada RSUD	1340	Rp 3,000	Rp 4,020,000
6	KECAMATAN			
	Eselon III a (Camat)	2290	Rp 4,400	Rp 10,076,000
	Eselon III b	1675	Rp 3,000	Rp 5,025,000
	Eselon IV a	1340	Rp 3,000	Rp 4,020,000
	Eselon IV b	1295	Rp 2,750	Rp 3,561,250
7	KELURAHAN			
	Eselon IV a (Lurah)	1475	Rp 3,400	Rp 5,015,000

	Eselon IV b	1295	Rp 2,750	Rp 3,561,250
8	UPT (Puskesmas)			
	Eselon IV a/Kepala Puskesmas	1430	Rp 3,000	Rp 4,290,000
	Eselon IV b/Kepala Tata Usaha	1295	Rp 2,750	Rp 3,561,250
9	JFU			
	Golongan IV yang pernah menjabat Eselon II	1085	Rp 6,925	Rp 7,513,625
	Golongan IV keatas atau yang pernah menjabat Eselon III	1055	Rp 2,850	Rp 3,006,750
	Golongan III /Analisis, Penelaah, Penyusun, Perancang & sejenisnya	1005	Rp 2,000	Rp 2,010,000
	Golongan II / Bendahara, Pengolah Data, Pengadministrasi & sejenisnya	805	Rp 2,000	Rp 1,610,000
	Golongan I / Petugas Keamanan, Pengemudi, Pramuka Bakti, Pramuka Kebersihan & sejenisnya	755	Rp 2,000	Rp 1,510,000
	Golongan I / Petugas Keamanan, Pengemudi	370	Rp 2,000	Rp 740,000
	Golongan I / Pramuka Bakti, Pramuka Kebersihan & sejenisnya	205	Rp 2,000	Rp 410,000
10	JFT Perencana			
	Perencana Utama	2365	Rp 3,000	Rp 7,095,000
	Perencana Madya	1860	Rp 3,000	Rp 5,580,000
	Perencana Muda	1420	Rp 3,000	Rp 4,260,000
	Perencana Pertama	1255	Rp 3,000	Rp 3,765,000
11	JFT Auditor dan P2UPD			
	Auditor Utama	2365	Rp 3,000	Rp 7,095,000
	Auditor Madya	1860	Rp 3,000	Rp 5,580,000
	Auditor Muda	1430	Rp 3,000	Rp 4,290,000
	Auditor Pertama	1255	Rp 3,000	Rp 3,765,000
	Auditor Pelaksana	805	Rp 2,000	Rp 1,610,000
	Auditor Pelaksana Lanjutan	905	Rp 2,000	Rp 1,810,000
	Auditor Penyelia	1105	Rp 1,850	Rp 2,044,250
	P2UPD Utama	2365	Rp 3,000	Rp 7,095,000
	P2UPD Madya	1860	Rp 3,000	Rp 5,580,000
	P2UPD Muda	1430	Rp 3,000	Rp 4,290,000
	P2UPD Pertama	1255	Rp 3,000	Rp 3,765,000
	Auditor Kepegawaian Pertama	1255	Rp 3,000	Rp 3,765,000
	Auditor Kepegawaian Muda	1430	Rp 3,000	Rp 4,290,000
	Auditor Kepegawaian Madya	1860	Rp 3,000	Rp 7,095,000
	Auditor Kepegawaian Utama	2365	Rp 3,000	Rp 5,580,000
12	JFT Pengadaan barang dan jasa			
	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	1300	Rp 5,000	Rp 6,500,000
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Muda	1400	Rp 5,000	Rp 7,000,000
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Madya	2095	Rp 3,600	Rp 7,542,000
13	JFT Tenaga Pendidikan			
	Guru	1205	Rp 1,000	Rp 1,205,000
	Penilik	1355	Rp 2,000	Rp 2,710,000
	Pengawas	1355	Rp 2,000	Rp 2,710,000
	Kepala Sekolah TK	1220	Rp 1,400	Rp 1,708,000
	Kepala Sekolah SD	1315	Rp 1,750	Rp 2,301,250
	Kepala Sekolah SMP	1375	Rp 1,750	Rp 2,406,250
14	Tenaga Kesehatan pada RSUD			
	Dokter Spesialis	3200	Rp 9,375	Rp 30,000,000
	Dokter Spesialis Residen	3200	Rp 3,125	Rp 10,000,000
	WKDS (Wajib Kerja Dokter Spesialis)	3000	Rp 5,000	Rp 15,000,000
	Teknik Elektromedis	805	Rp 2,800	Rp 2,254,500
	Dokter Umum	1535	Rp 5,025	Rp 7,718,750
	Dokter Gigi	1535	Rp 3,725	Rp 5,717,875
	Apoteker	1265	Rp 3,000	Rp 3,795,000
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	1140	Rp 1,800	Rp 2,052,000
	Psikolog	1140	Rp 1,800	Rp 2,052,000
	Radiografer	1085	Rp 2,700	Rp 2,929,500
	Pranata Laboratorium Kesehatan	835	Rp 2,700	Rp 2,254,500
	Asisten Apoteker	765	Rp 2,700	Rp 2,065,500
	Teknisi Transfusi Darah	605	Rp 2,675	Rp 1,618,375
	Epidemiolog Kesehatan	1140	Rp 1,800	Rp 2,052,000
	Pembimbing Kesehatan Kerja	1140	Rp 1,800	Rp 2,052,000
	Administrator Kesehatan	1140	Rp 1,800	Rp 2,052,000
	Sanitarian	640	Rp 2,375	Rp 1,520,000
	Nutrisionis	840	Rp 1,925	Rp 1,617,000
	Bidan	850	Rp 2,750	Rp 2,337,500
	Perawat	850	Rp 2,750	Rp 2,337,500
	Refraksionis Optisien	840	Rp 2,750	Rp 2,310,000
	Fisioterapis	840	Rp 2,750	Rp 2,310,000
	Perekam Medis	640	Rp 2,375	Rp 1,520,000

	Perawat Gigi	850	Rp 2,750	Rp 2,337,500
	<u>NERS</u>			
	Perawat NERS	1135	Rp 2,250	Rp 3,060,000
	<u>ANESTHESI</u>			
	Perawat Anesthesi	850	Rp 3,600	Rp 3,060,000
	Juru Masak	340	Rp 5,000	Rp 1,700,000
15	Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan (Daerah Biasa)			
	Dokter	1535	Rp 2,350	Rp 3,607,250
	Dokter Gigi	1535	Rp 2,350	Rp 3,607,250
	Bidan (Tk. Ahli)	1105	Rp 1,500	Rp 1,657,500
	Bidan (Tk. Terampil)	1035	Rp 1,500	Rp 1,552,500
	Apoteker (Tk. Ahli)	1105	Rp 1,450	Rp 1,602,500
	Perawat (Tk. Ahli)	1105	Rp 1,500	Rp 1,657,500
	Perawat (Tk. Terampil)	1035	Rp 1,500	Rp 1,552,500
	Asisten Apoteker (Tk. Terampil)	1035	Rp 1,500	Rp 1,552,500
	Perawat Gigi (Tk. Terampil)	1035	Rp 1,500	Rp 1,552,500
	Nutrisionis (Tk. Ahli)	1105	Rp 1,450	Rp 1,602,500
	Nutrisionis (Tk. Terampil)	1035	Rp 1,500	Rp 1,552,500
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat (Tk. Ahli)	1105	Rp 1,450	Rp 1,602,500
	Sanitarian (Tk. Ahli)	1105	Rp 1,450	Rp 1,602,500
	Sanitarian (Tk. Terampil)	1035	Rp 1,500	Rp 1,552,500
	Pranata Laboratorium Kesehatan (Tk. Ahli)	1105	Rp 1,450	Rp 1,602,500
	Pranata Laboratorium Kesehatan (Tk. Terampil)	1035	Rp 1,500	Rp 1,552,500
	Perekam Medis (Tk. Terampil)	1035	Rp 1,500	Rp 1,552,500
16	Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan (Daerah Terpencil)			
	Dokter	1535	Rp 3,000	Rp 4,605,000
	Dokter Gigi	1535	Rp 3,000	Rp 4,605,000
	Bidan (Tk. Ahli)	1105	Rp 1,700	Rp 1,878,500
	Bidan (Tk. Terampil)	1035	Rp 1,750	Rp 1,811,250
	Apoteker (Tk. Ahli)	1105	Rp 1,500	Rp 1,657,500
	Perawat (Tk. Ahli)	1105	Rp 1,700	Rp 1,878,500
	Perawat (Tk. Terampil)	1035	Rp 1,750	Rp 1,811,250
	Asisten Apoteker (Tk. Terampil)	1035	Rp 1,600	Rp 1,656,000
	Perawat Gigi (Tk. Terampil)	1035	Rp 1,750	Rp 1,811,250
	Nutrisionis (Tk. Ahli)	1105	Rp 1,500	Rp 1,657,500
	Nutrisionis (Tk. Terampil)	1035	Rp 1,600	Rp 1,656,000
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat (Tk. Ahli)	1105	Rp 1,500	Rp 1,657,500
	Sanitarian (Tk. Ahli)	1105	Rp 1,500	Rp 1,657,500
	Sanitarian (Tk. Terampil)	1035	Rp 1,600	Rp 1,656,000
	Pranata Laboratorium Kesehatan (Tk. Ahli)	1105	Rp 1,500	Rp 1,657,500
	Pranata Laboratorium Kesehatan (Tk. Terampil)	1035	Rp 1,600	Rp 1,656,000
	Perekam Medis (Tk. Terampil)	1035	Rp 1,600	Rp 1,656,000
17	JFT (Kelangkaan profesi dokter hewan dan Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Penyuluh Peternakan dan sejenisnya)			
	Medik Veteriner Ahli Pertama	1350	Rp 2,400	Rp 3,240,000
	Medik Veteriner Ahli Muda	1440	Rp 2,400	Rp 3,456,000
	Medik Veteriner Ahli Madya	1860	Rp 2,000	Rp 3,720,000
	Medik Veteriner Ahli Utama	2365	Rp 1,700	Rp 4,020,000
	Paramedik Veteriner pelaksana atau Golongan II	805	Rp 2,000	Rp 1,610,000
	Paramedik Veteriner pertama atau Golongan III	1180	Rp 1,700	Rp 2,006,000
	Paramedik Veteriner (Golongan IV)	1800	Rp 1,500	Rp 2,700,000
	Pengawas Mutu Pakan pelaksana atau Golongan II	805	Rp 2,000	Rp 1,610,000
	Pengawas Mutu Pakan pertama atau Golongan III	1180	Rp 1,700	Rp 2,006,000
	Pengawas Mutu Pakan(Golongan IV)	1800	Rp 1,500	Rp 2,700,000
	Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman pelaksana atau Golongan II	805	Rp 2,000	Rp 1,610,000
	Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman pertama atau Golongan III	1180	Rp 1,700	Rp 2,006,000
	Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman(Golongan IV)	1800	Rp 1,500	Rp 2,700,000
	Pengawas Benih Tanamanpelaksana atau Golongan II	805	Rp 2,000	Rp 1,610,000
	Pengawas Benih Tanaman pertama atau Golongan III	1180	Rp 1,700	Rp 2,006,000
	Pengawas Benih Tanaman(Golongan IV)	1800	Rp 1,500	Rp 2,700,000
	Pengawas Bibit Ternak pelaksana atau Golongan II	805	Rp 2,000	Rp 1,610,000
	Pengawas Bibit Ternak pertama atau Golongan III	1180	Rp 1,700	Rp 2,006,000
	Pengawas Bibit Ternak (Golongan IV)	1800	Rp 1,500	Rp 2,700,000
	Pengawas Mutu Hasil Pertanian pelaksana/Golongan II	805	Rp 2,000	Rp 1,610,000
	Pengawas Mutu Hasil Pertanian (Golongan III)	1180	Rp 1,700	Rp 2,006,000
	Pengawas Mutu Hasil Pertanian (Golongan IV)	1800	Rp 1,500	Rp 2,700,000
18	JFT (Pengendali Lingkungan Hidup dan sejenisnya)			

	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Pelaksana/Gol II	805	Rp 2,000	Rp 1,610,000
	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Pertama	1350	Rp 2,000	Rp 2,700,000
	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda	1400	Rp 2,000	Rp 2,800,000
	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Madya	1870	Rp 2,000	Rp 3,740,000
	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	1350	Rp 2,000	Rp 2,700,000
	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	1400	Rp 2,000	Rp 2,800,000
	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya	1870	Rp 2,000	Rp 3,740,000
	Perencana Lingkungan Hidup	1350	Rp 2,000	Rp 2,700,000
19	JFT (Analisis Kepegawaian)			
	Analisis Kepegawaian Pertama	1180	Rp 1,700	Rp 2,006,000
	Analisis Kepegawaian Muda	1355	Rp 1,700	Rp 2,303,500
	Analisis Kepegawaian Madya	1860	Rp 1,700	Rp 3,162,000
	Analisis Kepegawaian Utama	2365	Rp 1,700	Rp 4,020,500
20	JFT (Pranata Komputer)			
	Pranata Komputer Pelaksana atau Golongan II	805	Rp 2,000	Rp 1,610,000
	Pranata Komputer Ahli Pertama atau Golongan III	1180	Rp 1,700	Rp 2,006,000
	Pranata Komputer Ahli Muda	1355	Rp 1,700	Rp 2,303,500
	Pranata Komputer Ahli Madya	1860	Rp 1,700	Rp 3,162,000
	Pranata Komputer Ahli Utama	2365	Rp 1,700	Rp 4,020,500
21	JFT lainnya (Tingkat Ahli)			
	Fungsional Ahli Pertama	1180	Rp 1,700	Rp 2,006,000
	Fungsional Ahli Muda	1355	Rp 1,700	Rp 2,303,500
	Fungsional Ahli Madya	1860	Rp 1,700	Rp 3,162,000
	Fungsional Ahli Utama	2365	Rp 1,700	Rp 4,020,500
22	JFT lainnya (Tingkat Terampil)			
	Fungsional Terampil Pelaksana atau Golongan II	805	Rp 2,000	Rp 1,610,000
23	JFT (Analisis Kebijakan)			
	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	1180	Rp 1,700	Rp 2,006,000
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1355	Rp 1,700	Rp 2,303,500
	Analisis Kebijakan Ahli Madya	1860	Rp 1,700	Rp 3,162,000
	Analisis Kebijakan Ahli Utama	2365	Rp 1,700	Rp 4,020,500
24	JFT (Analisis Ketahanan Pangan)			
	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	1180	Rp 1,700	Rp 2,006,000
	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	1355	Rp 1,700	Rp 2,303,500
	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya	1860	Rp 1,700	Rp 3,162,000
25	JFT (Arsiparis)			
	Arsiparis Terampil atau Golongan II	805	Rp 2,000	Rp 1,610,000
	Arsiparis Ahli Pertama atau Golongan III	1180	Rp 1,700	Rp 2,006,000
	Arsiparis Ahli Muda	1355	Rp 1,700	Rp 2,303,500
	Arsiparis Ahli Madya	1860	Rp 1,700	Rp 3,162,000
	Arsiparis Ahli Utama	2365	Rp 1,700	Rp 4,020,500
26	JFT (Instruktur)			
	Instruktur Pelaksana atau Golongan II	805	Rp 2,000	Rp 1,610,000
	Instruktur Ahli Pertama atau Golongan III	1180	Rp 1,700	Rp 2,006,000
	Instruktur Ahli Muda	1355	Rp 1,700	Rp 2,303,500
	Instruktur Ahli Madya	1860	Rp 1,700	Rp 3,162,000
27	JFT (Mediator Hubungan Industri)			
	Mediator Hubungan Industri Ahli Pertama	1180	Rp 1,700	Rp 2,006,000
	Mediator Hubungan Industri Ahli Muda	1355	Rp 1,700	Rp 2,303,500
	Mediator Hubungan Industri Ahli Madya	1860	Rp 1,700	Rp 3,162,000
28	JFT (Pekerja Sosial)			
	Pekerja Sosial Pelaksana atau Golongan II	805	Rp 2,000	Rp 1,610,000
	Pekerja Sosial Ahli Pertama atau Golongan III	1180	Rp 1,700	Rp 2,006,000
	Pekerja Sosial Ahli Muda	1355	Rp 1,700	Rp 2,303,500
	Pekerja Sosial Ahli Madya	1860	Rp 1,700	Rp 3,162,000
29	JFT (Pengawas Perikanan/Pengawas Benih Ikan)			
	Pengawas Perikanan/Pengawas Pelaksana Benih Ikan atau Golongan II	805	Rp 2,000	Rp 1,610,000
	Pengawas Perikanan/Pengawas Benih Ikan Ahli Pertama atau Golongan III	1180	Rp 1,700	Rp 2,006,000
	Pengawas Perikanan/Pengawas Benih Ikan Ahli Muda	1355	Rp 1,700	Rp 2,303,500
	Pengawas Perikanan/Pengawas Benih Ikan Ahli Madya	1860	Rp 1,700	Rp 3,162,000
30	JFT (Penggerak Swadaya Masyarakat)			
	Penggerak Swadaya Masyarakat Pelaksana/Golongan II	805	Rp 2,000	Rp 1,610,000
	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama/Golongan III	1180	Rp 1,700	Rp 2,006,000
	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	1355	Rp 1,700	Rp 2,303,500
	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya	1860	Rp 1,700	Rp 3,162,000
31	JFT (Penguji Kendaraan Bermotor)			
	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana atau Golongan II	805	Rp 2,000	Rp 1,610,000
	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan/Gol III	1005	Rp 2,000	Rp 2,010,000
	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	1105	Rp 2,000	Rp 2,210,000

32	JFT (Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan)				
	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana/Gol II	805	Rp	2,000	Rp 1,610,000
	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama atau Golongan III	1180	Rp	1,700	Rp 2,006,000
	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	1355	Rp	1,700	Rp 2,303,500
	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Madya	1860	Rp	1,700	Rp 3,162,000
33	JFT (Penyuluh Pertanian)				
	Penyuluh Pertanian Pelaksana atau Golongan II	805	Rp	2,000	Rp 1,610,000
	Penyuluh Pertanian Pertama atau Golongan III	1180	Rp	1,700	Rp 2,006,000
	Penyuluh Pertanian Golongan IV	1800	Rp	1,500	Rp 3,700,000
34	JFT (Penyuluh Sosial)				
	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	1180	Rp	1,700	Rp 2,006,000
	Penyuluh Sosial Ahli Muda	1355	Rp	1,700	Rp 2,303,500
	Penyuluh Sosial Ahli Madya	1860	Rp	1,700	Rp 3,162,000
35	JFT (Perancang Peraturan dan Perundang-undangan)				
	Perancang Peraturan dan Perundang-undangan Ahli Pertama	1180	Rp	1,700	Rp 2,006,000
	Perancang Peraturan dan Perundang-undangan Ahli Muda	1355	Rp	1,700	Rp 2,303,500
	Perancang Peraturan dan Perundang-undangan Ahli Madya	1860	Rp	1,700	Rp 3,162,000
	Perancang Peraturan dan Perundang-undangan Ahli Utama	2365	Rp	1,700	Rp 4,020,500
36	JFT (Pranata Hubungan Masyarakat)				
	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana atau Golongan II	805	Rp	2,000	Rp 1,610,000
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama atau Golongan III	1180	Rp	1,700	Rp 2,006,000
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	1355	Rp	1,700	Rp 2,303,500
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	1860	Rp	1,700	Rp 3,162,000
37	JFT (Satuan Polisi Pamong Praja)				
	Satuan Polisi Pamong Pelaksana atau Golongan II	805	Rp	2,000	Rp 1,610,000
	Satuan Polisi Pamong Praja Ahli Pertama atau Golongan III	1180	Rp	1,700	Rp 2,006,000
	Satuan Polisi Pamong Praja Ahli Muda	1355	Rp	1,700	Rp 2,303,500
	Satuan Polisi Pamong Praja Ahli Madya	1860	Rp	1,700	Rp 3,162,000
38	JFT (Teknik Jalan dan Jembatan)				
	Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana atau Golongan II	805	Rp	2,000	Rp 1,610,000
	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama atau Golongan III	1180	Rp	1,700	Rp 2,006,000
	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	1355	Rp	1,700	Rp 2,303,500
	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Madya	1860	Rp	1,700	Rp 3,162,000
	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Utama	2365	Rp	1,700	Rp 4,020,500
39	JFT (Teknik Penyehatan Lingkungan)				
	Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana/Golongan II	805	Rp	2,000	Rp 1,610,000
	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama atau Golongan III	1180	Rp	1,700	Rp 2,006,000
	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	1355	Rp	1,700	Rp 2,303,500
	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Madya	1860	Rp	1,700	Rp 3,162,000
	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Utama	2365	Rp	1,700	Rp 4,020,500

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR